

Sosok Danpaspampres yang Baru, Marsma Wahyu dari Satuan Elite TNI AU

JAKARTA (IM) - Marsesal Pertama Wahyu Hidayat Sudjatmiko kini menadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres), menggantikan Mayjen Tri Budi Utomo yang dipercaya menjadi Pangdam VI/Mulawarman.

Saat Budi masih menjabat sebagai Danpaspampres, Wahyu merupakan wakilnya. Wahyu dipercaya menjadi Danpaspampres tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI Nomor 6 Kep/558/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Dengan demikian, Wahyu mencatatkan sejarah baru, sebagai perwira tinggi TNI AU pertama yang menjadi Danpaspampres.

"Dipilihnya Marsesal Pertama (Marsma) TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko sebagai Komandan Paspampres mencatatkan sejarah baru, karena baru pertama kali ini Danpaspampres dijabat oleh perwira tinggi dari TNI Angkatan Udara," tulis situs resmi kopasgat.tni-au.mil.id, yang dikutip pada Senin (4/7).

Dengan jabatan baru yang segera diembannya, Wa-

hyu akan menyandang pangkat marsekal muda (marsda) atau perwira tinggi bintang dua.

Wahyu merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1993 dari Korps Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat). Kopasgat merupakan satuan elite TNI AU yang sebelumnya bernama Korps Pasukan Khusus (Kopaskhas) yang identik dengan baret jingganya.

Selama meniti kariernya di pasukan elite TNI AU, Wahyu telah menduduki sejumlah jabatan strategis, di antaranya menjadi Komandan Batalyon Komando 462/Paskhas (2006). Kemudian Komandan Skadron Udara Karbol I Wingkar AAU (2008), Danden 3 Grup A Paspampres (2010).

Kemudian menjadi Wadan Grup A Paspampres, dan Komandan Grup C Paspampres. Kemudian Asops Korpaskhas (2014-2015), Komandan Pusdiklat Paskhas (2015-2016), Patun Kelompok Susstaf Korsis Seskoau (2016-2018), Asren Korpaskhas (2018-2021) sebelum berganti menjadi Kopasgat, dan Wakil Komandan Paspampres (2021-2022).

● han

8 Eks Anggota DPRD Tulungagung Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan (KPK) memeriksa 8 mantan Anggota DPRD Tulungagung, Senin (4/7). Mereka diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018.

Delapan Anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019 yang diperiksa adalah Widodo Prasetyo, Basroni, Subani Sirab, Saiful Anwar, Sumarno, Heru Santoso, Imam Sukanto, serta Mutini. Mereka diperiksa penyidik KPK di Mapolres Tulungagung.

"Hari ini (Senin), pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi bantuan Pemprop Jatim untuk Pemerintah Kabupaten Tulungagung TA 2014-2018. Pemeriksaan dilakukan di Polres Tulungagung," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (4/7).

Sebagaimana diketahui, KPK saat ini sedang

mengembangkan kasus dugaan suap terkait pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 untuk Kabupaten Tulungagung. KPK juga telah menetapkan sejumlah tersangka sejalan dengan pengembangan perkara suap tersebut.

Namun, KPK masih merahasiakan nama-nama tersangka terkait pengembangan alokasi anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur untuk Tulungagung tersebut. KPK akan menginformasikan secara detail para tersangka serta konstruksi perkara pada saat proses penangkapan dan penahanan.

KPK saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti tambahan lewat keterangan para saksi. Sejumlah saksi akan diperiksa dalam beberapa waktu ke depan. KPK berjanji akan menginformasikan ke publik secara transparan proses penyidikan perkara ini. ● han

Cuaca Ekstrem di NTT, Dua Warga Tewas dan 1 Hilang

JAKARTA (IM) - Cuaca ekstrem melanda wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (29/6) pukul 23.00 WITA, mengakibatkan dua warga meninggal dunia dan satu warga hilang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan melaporkan, Desa Toineke di Kecamatan Kualin, mengalami kerusakan akibat dihantam angin kencang, banjir dan tanah longsor.

BPBD Kabupaten Timor Tengah Selatan mencatat, sedikitnya 100 rumah terdampak, enam rumah rusak berat, satu unit sekolah rusak berat dan lahan pertanian warga. Ketinggian debit air pada saat terjadi banjir berkisar antara 150 sentimeter. Akibatnya sejumlah warga memilih mengungsi ke rumah kerabat.

"Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI-Polri, Basarnas, Pemerintah Daerah, Relawan dan Masyarakat bekerja sama untuk melakukan manajemen darurat berupa pendataan dan pemantauan," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya, Senin (4/7).

Upaya evakuasi dan

penelitian terhadap korban hilang masih dilakukan di sekitar aliran sungai. Jalan dan jembatan yang rusak pascalongsor juga tengah diinisiasi untuk memudahkan lalu lintas para warga.

Pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat hingga 14 hari ke depan. Hal ini diambil guna memberikan percepatan penanganan darurat terhadap warga terdampak.

Merujuk peringatan dini yang dikeluarkan BMKG pada 3 Juli waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Mangarai, Ende, Alor, Sumba Barat Daya, Sumba Barat dan Sumba Timur dan waspada potensi angin kencang di wilayah Pulau Flores bagian Barat, Pulau Timor, Pulau Rote, Pulau Sabu, dan Pulau Sumba bagian timur. Pihak BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kewaspadaan terhadap potensi bahaya hidrometeorologi.

"Masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai dan daerah dengan kelengkapan curam agar waspada dan evaluasi sementara secara mandiri jika terjadi hujan menerus dengan intensitas tinggi dan durasi lebih dari satu jam," katanya. ● mei

2 Polhukam

FOTO/ANT



Luhut Minta Sosialisasi Pembelian MGCR Lewat PeduliLindungi Diperpanjang

Menko Luhut Panjaitan mengklaim bahwa harga minyak goreng telah mencapai Rp 14.000 per liter untuk wilayah Jawa dan Bali.

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta masa sosialisasi pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) menggunakan aplikasi PeduliLindungi diperpanjang hingga tiga bulan.

Menurutnya, masih banyak pengecer yang belum mengunggah QR code PeduliLindungi sehingga masa sosialisasinya perlu diperpanjang.

"Saya juga minta masa transisi dan sosialisasi penggunaan Peduli Lindungi yang tadinya dua minggu, bisa di-

perpanjang selama tiga bulan. Kita harus memahami proses adaptasi yang masih dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan," kata Luhut saat memimpin rapat evaluasi pada Jumat (1/7), dikutip dari siaran pers, Senin (4/7).

Selama masa perpanjangan sosialisasi tersebut, masyarakat tetap dapat membeli MGCR tanpa menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK). Akan tetapi, pemerintah berharap agar para pengecer dan pembeli mulai menggunakan dan membiasakan penggunaan PeduliLindungi dalam melaku-

kan aktivitas jual beli.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong para pengecer untuk segera mencetak QR code PeduliLindungi melalui aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Si Mirah) 2.0 maupun Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE).

Selain itu, pemerintah juga akan terus mengembangkan penggunaan PeduliLindungi sebagai alat pengawasan distribusi minyak goreng untuk mengantisipasi kenaikan harga di masa yang akan datang.

Di samping itu, Luhut juga mengklaim harga minyak goreng telah mencapai Rp 14.000 per liter di wilayah Jawa dan Bali.

"Sehingga kebijakan di sisi hulu dapat kita mulai relaksasi secara hati-hati untuk mempercepat ekspor dan memperbaiki harga Tandan Buah

Segar (TBS) di tingkat petani," ujarnya.

Luhut mengatakab, pemerintah akan segera mendorong penyesuaian harga MGCR di luar Jawa-Bali yang masih belum sesuai harga eceran tertinggi (HET). Sebab itu, Kementerian Perdagangan diminta untuk mempercepat program minyak goreng kemasan rakyat.

"Untuk mengakselerasi minyak goreng kemasan perlu diberikan insentif yang menarik bagi produsen, sehingga mereka dapat bergerak lebih

RAKER TERKAIT AGRARIA DAN TATA RUANG

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kanan) bersama Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni (kiri) memberikan paparannya saat mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Akutabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/7). Raker tersebut beragendakan penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanian Nasional.

DPR Desak Agar Izin Travel yang Bikin 46 Jemaah Gagal Naik Haji Dicabut

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzid mendorong agar izin perusahaan travel yang membawa 46 jemaah tak bervisa resmi dicabut. Diketahui, ke-46 orang yang disebut berstatus jemaah furoda atau nonkuota itu sempat terdampar di Jeddah, Arab Saudi karena tidak memiliki visa resmi.

"Sesuai dengan UU Haji dan Umroh, bagi siapa pun perusahaan yang memberangkatkan jemaah tanpa melalui sistem perjalanan haji yang telah ditetapkan, maka sebaiknya perusahaan itu diberikan sanksi. Dicabut perizinannya karena telah mengambil dana cukup besar dari masyarakat tanpa mekanisme perjalanan sebagaimana aturan yang berlaku," ujar Ace kepada wartawan, Senin (4/7).

Ace menduga ke-46 jemaah ini menjadi korban dari pihak travel yang secara sengaja memberangkatkan mereka ke Tanah Suci dengan tujuan ibadah haji tanpa prosedur resmi. Meski demikian, pemerintah Indonesia tetap memberikan perlindungan atas keselamatan mereka selama di Arab Saudi.

"Selalu ada cara masyarakat untuk mendapatkan visa untuk berangkat haji tanpa melalui sistem yang berlaku karena dapat tunggu antrean yang panjang. Ke-46 orang ini mendapatkan visa Arab Saudi dari negara lain, dalam hal ini Singapura dan Malaysia, yang bukan merupakan visa haji," tuturnya.

Sementara itu, Ace mengingatkan masyarakat agar hati-hati dalam menerima tawaran perjalanan haji tanpa sistem dan prosedur perjalanan haji secara resmi. Apalagi, kata Ace, mendapatkan visa negara lain padahal didapatkan dari negara lain, bukan merupakan visa haji.

"Oleh karena itu, untuk menegakkan peraturan perundang-undangan, saya mendukung upaya pemulangan ke-46 WNI ini. Langkah ini

sebagai pembelajaran agar kita konsisten bahwa penggunaan visa ya harus dipergunakan sesuai dengan peruntukannya," imbuh Ace.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, 46 jemaah haji non-kuota atau furoda asal Indonesia terdampar di Jeddah, Arab Saudi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan, 46 orang tersebut kini sudah dipulangkan ke Indonesia.

"Kemarin sempat terdampar di Jeddah, alhamdulillah sehat-sehat dan sudah bisa kembali ke Indonesia," ujar Hilman pada Minggu (3/7).

Ke-46 orang itu memiliki visa tidak resmi. Ia mengingatkan warga yang ingin berangkat haji secara mandiri untuk memilih organisasi atau perusahaan resmi.

Dengan demikian, jika terjadi sesuatu kepada jemaah haji furoda, Kemenag bisa menegur perusahaan tersebut.

"Kalau seperti ini kami tidak bisa lakukan apa-apa karena tidak terkait sama sekali," tutur Hilman.

"Kami memahami betul keinginan masyarakat bisa menunaikan haji setelah dua tahun enggak ada. Tapi kehati-hatian tetap harus ada," ujarnya. ● mei



FOTO: ANT

VAKSIN PMK TAHAP KETIGA TIBA DI JAKARTA

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar (kanan atas) menunjukan boks berisi vaksin untuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) setibanya dari Prancis di Terminal Kargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (4/7). Sebanyak 94.000 dosis Vaksin PMK kedatangan tahap ketiga ini melengkapi rangkaian importasi vaksin PMK pesanan Pemerintah Indonesia dari Prancis dengan total 3.104.000 dosis vaksin, yang diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran virus PMK pada hewan.

KPK Yakin Dewas Profesional Proses Sidang Etik Lili Pintauli

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Dewan Pengawas (Dewas) bakal profesional dan transparan dalam memproses sidang etik dugaan gratifikasi dengan terlapor Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. KPK menghormati proses penegakan etik yang sedang dilakukan Dewas terhadap laporan dugaan gratifikasi Lili.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan hal ini untuk menanggapi rumor adanya upaya Lili menyuar Dewas KPK lewat pihak PT Pertamina. Diketahui, Lili dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga menerima gratifikasi dari PT Pertamina berupa tiket nonton ajang balap MotoGP di Sirkuit Mandalika.

"Pada prinsipnya KPK menghormati seluruh proses di Dewas sebagaimana tugas dan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 37B UU KPK," kata Ali melalui pesan singkatnya, Senin (4/7).

"KPK menyakini, setiap tahapan dilakukan secara profesional sesuai fakta dan penilaian Dewas. Hasilnya pun akan disampaikan kepada masyarakat sebagai prinsip akuntabilitas dan transpar-

ansi," ujarnya.

Sebagai informasi, Dewas KPK bakal menggelar sidang etik terkait laporan dugaan menerima gratifikasi Lili Pintauli Siregar pada Selasa, 5 Juli 2022, besok. KPK mengajak masyarakat dan seluruh elemen untuk sama-sama menghormati proses penegakan etik yang sedang dilakukan Dewas.

"Oleh karenanya mari kita hormati proses yang sedang berlangsung ini. Karena penegakkan kode etik oleh Dewas adalah bagian untuk memperkuat pemberantasan korupsi KPK," kata Ali.

Lili Pintauli Siregar kembali tersandung masalah. Namanya pun kembali menjadi

perbincangan hangat setelah dilaporkan ke Dewas KPK.

Kali ini, Lili Pintauli dilaporkan karena diduga menerima gratifikasi berupa tiket nonton ajang balap MotoGP di Sirkuit Mandalika dari perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN yang memberikan tiket nonton MotoGP tersebut dikabarkan adalah PT Pertamina.

Lili masih enggan buka suara terkait laporan dugaan pelanggaran etik penerimaan gratifikasi tiket nonton MotoGP. Sementara itu, KPK menyerahkan sepenuhnya proses laporan dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar kepada Dewas KPK. ● han

PENGUMUMAN
Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SUCCESS LINK (dalam Likuidasi), berkedudukan di Jakarta Pusat, tanggal 4 Juli 2022, Nomor 3, yang dibuat dihadapan Dr. UDIN NARSUDIN, SH, M.Hum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, para pemegang saham PT. KORINCHI, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan") dengan suara bulat telah memutuskan MEMBUKARKAN Perseroan serta menunjuk Direksi Perseroan sebagai Likuidator Perseroan.
Para Pihak yang keberatan mengenai hal tersebut dilas dapat mengajukan Likuidator Perseroan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, di alamat: Jl. Danau Sunter Utara Blok F No. 6, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Jakarta, 5 Juli 2022
LIKUIDATOR PERSEROAN

PENGUMUMAN
Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sirkuit Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SUCCESS LINK (dalam Likuidasi), berkedudukan di Jakarta Pusat, tanggal 4 Juli 2022, Nomor 3, yang dibuat dihadapan Martinus, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan:
1. Menyetujui pembubaran/likuidasi Perseroan;
2. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Tn. Toto Sugeng Wyoso selaku Likuidator untuk menyelesaikan aset-aset dan segala kewajiban Perseroan sehubungan dengan proses pembubaran/likuidasi Perseroan.
Segala keberatan dan sanggahan dapat diajukan kepada:
Toto Sugeng Wyoso
Gama Tower Lantai 46, Jalan HR. Rasuna Said Kavling C-22, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
Jakarta, 5 Juli 2022
LIKUIDATOR

PENGUMUMAN
Sehubungan dengan proses likuidasi yang sedang dilaksanakan PT SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS BALI (dalam Likuidasi) (selanjutnya disebut "Perseroan"), dan guna memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bersama ini diumumkan sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022, telah diumumkan pembubaran dan likuidasi Perseroan dan panggilan terhadap kreditor Perseroan untuk mengajukan tagihan atas utang Perseroan;
2. Bahwa sampai dengan tanggal 21 Mei 2022, Perseroan tidak menerima tagihan dari kreditor. Sehingga tidak terdapat kewajiban bagi Perseroan sehubungan dengan utang piutang Perseroan;
3. Bahwa Likuidator telah melakukan verifikasi selama jangka waktu yang telah ditentukan dan berkesimpulan bahwa berdasarkan Neraca per tanggal 20 Juni 2022, tercatat sisa harta kekayaan hasil likuidasi Perseroan sebesar Rp. 43.346.314.363,- yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.
Demikian pengumuman ini disampaikan.
Buleleng, 5 Juli 2022
Likuidator
PT SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS BALI (dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN
Direksi dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INDO TRAKTAMA CEMERLANG berkedudukan di Jakarta Pusat tertanggal 30 Juni 2022, dibuat dihadapan JAP SUN JAW, SH. Notaris di Jakarta, telah diambil keputusan, yaitu:
Menurunkan modal dasar perseroan dari semula sebesar Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) menjadi sebesar Rp.6.296.400.000,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan sekaligus menurunkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp.6.296.400.000,- (enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)
Sehubungan dengan Keputusan Para Pemegang Saham diatas, maka apabila ada kreditor yang merasa keberatan, dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan tersebut diatas dengan menyampaikan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini.
Demikian pengumuman ini disampaikan agar dapat dimaklumi.
Jakarta, 5 Juli 2022
PT. INDO TRAKTAMA CEMERLANG
TU
DIREKSI